



## Menelisik Kekerasan Politik Berbasis Gender dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dan Dampak terhadap Keterwakilan Perempuan

Tri Nurul Aida<sup>1\*</sup>, Siti Dina Setiani<sup>2</sup>, Ika Arinia Indriyany<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: [6670230091@untirta.ac.id](mailto:6670230091@untirta.ac.id)<sup>1\*</sup>, [6670230028@untirta.ac.id](mailto:6670230028@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [ika.arinia@untirta.ac.id](mailto:ika.arinia@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [6670230091@untirta.ac.id](mailto:6670230091@untirta.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze gender-based political violence in the 2020 Regional Head Elections in South Tangerang City and its impact on women's representation in politics. The case analyzed involves social media attacks against Rahayu Saraswati Djojohadikusumo during her campaign for Deputy Mayor, in which an old photo of her while pregnant was used as material for sexually charged attacks. This study employs a qualitative method using a case study approach through literature review. The analysis utilizes Kate Manne's theory of misogyny, which views misogyny as a social mechanism within the patriarchal system to control and discipline women entering the public sphere. The results of the study indicate that gender-based political violence manifests in the form of the moral delegitimization of women, digital intimidation or harassment, policing of women in public spaces, and the objectification of women's bodies. These phenomena demonstrate that gender bias remains a barrier for women in securing equal space in local political contests.*

**Keywords:** *Digital Space; Gender Based Political Violence; Local Elections; Misogyny; Women's Representation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan politik berbasis gender dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan serta dampaknya terhadap representasi perempuan dalam politik. Kasus yang dianalisis melibatkan serangan di media sosial terhadap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selama kampanyenya sebagai calon Wakil Walikota, di mana sebuah foto lamanya saat sedang hamil digunakan sebagai bahan serangan bernuansa seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui tinjauan pustaka. Analisisnya memanfaatkan teori misogini dari Kate Manne, yang memandang misogini sebagai mekanisme sosial dalam sistem patriarki untuk mengontrol dan mendisiplinkan perempuan yang memasuki ranah publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan politik berbasis gender terwujud dalam bentuk delegitimasi moral terhadap perempuan, intimidasi atau pelecehan digital, pengawasan terhadap perempuan di ruang publik, serta objektifikasi tubuh perempuan. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa bias gender tetap menjadi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh ruang yang setara dalam kontestasi politik lokal.

**Kata kunci:** Kekerasan Politik Berbasis Gender; Misogini; Pemilihan Lokal; Representasi Perempuan; Ruang Digital.

### 1. LATAR BELAKANG

Kekerasan berbasis gender dalam ranah politik menjadi tantangan utama yang dihadapi perempuan (Charity et al., 2025). Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami peningkatan kualitas dimana keadilan substantif demokrasi semakin menguat, terlihat dari bagaimana negara memberikan ruang dan memastikan bahwa kelompok rentan (perempuan) dapat terjamin dalam proses demokrasi electoral. Kehadiran negara dalam menjamin keterwakilan perempuan dalam politik dan pemilu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilu yang menetapkan kebijakan kuota minimum 30 persen, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Akan tetapi upaya kebijakan tersebut pada kenyataannya di lapangan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, dikarenakan adanya hambatan struktural yang menyulitkan perempuan dalam mengakses sumber daya politik (Fathoni, 2024).

Kekerasan politik berbasis gender merujuk pada tindakan yang menyerang aktor politik perempuan, dasar penyerangan umumnya karena identitas gender, kemudian terdapat dua bentuk penyerangan yang sering terjadi yakni serangan pelecehan secara verbal dan serangan non verbal (seksual) secara simbolik di ruang publik maupun digital. Berdasarkan gagasan Schneider dan Carroll (2020) dalam (Wildianti & Ramadhana, 2024) kekerasan pemilihan umum atau pilkada berbasis gender merupakan bentuk kekerasan dalam pemilu yang memasukkan aspek gender sebagai variabel analisis untuk memahami perbedaan korban, pelaku, lokasi kejadian, serta pola terjadinya insiden kekerasan selama proses pemilu/pilkada. Kekerasan berbasis gender dapat terealisasi disebabkan oleh dua hal, pertama kekerasan pemilu berbasis gender muncul dari diskriminasi gender atau misogini yang menghambat dan mengontrol partisipasi seseorang dalam proses pemilu.

Kekerasan politik berbasis gender dalam pemilu atau pilkada umumnya menargetkan perempuan dan kelompok rentan yang terlibat dalam berbagai peran politik seperti kandidat, pejabat terpilih, pemilih, kader partai, aktivis, maupun jurnalis. Bentuk kekerasan ini muncul sebagai upaya untuk melemahkan, membatasi, atau bahkan menghalangi partisipasi perempuan dalam proses politik. Pelaku kekerasan berbasis gender sering kali berasal dari laki-laki, meskipun dalam praktiknya tindakan tersebut tidak sepenuhnya terbatas pada satu jenis kelamin tertentu. Manifestasinya dapat berupa ancaman, pelecehan, serta intimidasi yang bersifat fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun di ruang privat (Schneider & Carroll, 2020) dalam (Wildianti & Ramadhana, 2024).

Lalu kedua, kekerasan pemilu atau pilkada berbasis gender juga dapat muncul akibat adanya kepentingan politik antar kelompok atau faksi yang berupaya mengendalikan serta memengaruhi jalannya proses dan hasil pemilu. Dalam situasi ini, kekerasan tidak hanya menargetkan perempuan, tetapi juga dapat menyasar pada laki-laki sebagai korban dalam dinamika persaingan politik. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam kontestasi, baik laki-laki maupun perempuan dengan dasar tujuannya memperoleh keuntungan politik atau memenangkan kompetisi elektoral. Praktiknya sering kali muncul dalam bentuk pelecehan, intimidasi, maupun ancaman yang bersifat fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang umumnya terjadi di ruang publik (tempo.co, 2023).

Fenomena kekerasan berbasis gender pada akhirnya menciptakan perspektif bahwa lingkungan politik bukan ranah aman untuk perempuan, sehingga berpotensi menghambat partisipasi politik perempuan secara lebih luas. Kekerasan terjadi di berbagai kontestasi politik, salah satunya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Kasus yang mendapat sorotan dari public salah satunya adalah foto lama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat sedang hamil, pada awalnya foto tersebut tidak mendapat perhatian publik, namun saat ia maju menjadi calon Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 foto tersebut menjadi sasaran serangan bernuansa seksual di media sosial. Foto tersebut menjadi atensi public karena terdapat satu akun yang mengupload kembali foto dengan caption atau narasi yang merendahkan dan mengobjektifikasi tubuh perempuan untuk kepentingan politik, serangan tersebut tidak menyoroti kapasitas politik kandidat, melainkan memanfaatkan tubuh dan pengalaman biologis perempuan sebagai alat delegitimasi politik (tempo.co, 2023).

Fenomena kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa serangan dalam kontestasi politik tidak selalu berkaitan dengan kemampuan kandidat dalam menyusun dan menjalankan program, tetapi juga dapat menyasar identitas gender kandidat perempuan. Serangan yang menargetkan aspek personal dan tubuh perempuan memperlihatkan bahwa dinamika persaingan politik sering kali dipengaruhi oleh bias gender yang berupaya melemahkan legitimasi politik kandidat perempuan di ruang publik dan media digital. Oleh karena itu, kasus yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan 2020 menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana bentuk kekerasan politik berbasis gender muncul dalam kontestasi politik lokal serta bagaimana dampaknya terhadap keterwakilan perempuan dalam politik.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Misogyny Kate Manne**

Kajian teori mengenai misogyny dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Kate Manne dalam bukunya *Down Girl: The Logic of Misogyny* (Mikkola, 2018). Dalam karyanya tersebut, Manne menegaskan bahwa misogyny tidak semata-mata dapat dipahami sebagai kebencian terhadap perempuan secara umum. Sebaliknya, misogyny dipandang sebagai suatu mekanisme sosial yang berfungsi untuk menegakkan serta mengawasi norma-norma patriarki yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Manne, misogyny bekerja layaknya “aparatus pengawas” dalam sistem patriarki yang bertugas menegur, menghukum, atau mengendalikan perempuan yang dianggap melanggar norma tersebut, sehingga secara tidak langsung memperkuat dominasi patriarki dalam kehidupan sosial.

Manne juga menekankan bahwa misogyny tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kebencian yang bersifat universal terhadap seluruh perempuan. Sebaliknya, misogyny merupakan bagian dari sistem kekuasaan yang mempertahankan hierarki gender. Dalam praktiknya, misogyny sering kali menargetkan perempuan-perempuan tertentu yang dinilai menyimpang dari ekspektasi sosial atau menantang struktur patriarki, seperti perempuan yang bersikap independen, vokal dalam menyuarakan pendapat, atau secara aktif menuntut hak-haknya. Dengan demikian, misogyny berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial yang bertujuan menjaga agar perempuan tetap berada dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh norma patriarki (Walker & Walker, 2024).

Lebih lanjut, Manne membedakan konsep misogyny dari seksisme. Seksisme umumnya berfungsi untuk memberikan pembenaran ideologis terhadap sistem patriarki melalui berbagai narasi atau keyakinan yang menormalisasi ketimpangan gender. Sementara itu, misogyny berperan sebagai mekanisme penegakan norma yang bersifat reaktif, terutama terhadap perempuan yang dianggap melanggar atau menentang tatanan tersebut. Manne juga menjelaskan bahwa misogyny tidak hanya muncul dalam bentuk sikap individu, tetapi juga dapat berwujud dalam praktik sosial, struktur kelembagaan, serta sistem institusional yang sering kali tidak disadari oleh pelaku maupun korban. Hal ini menyebabkan misogyny sulit diidentifikasi hanya melalui pendekatan psikologis individual.

Selain itu, Manne menolak pandangan yang menganggap misogyny sebagai bentuk dehumanisasi yang melihat perempuan sebagai makhluk yang kurang dari manusia. Sebaliknya, ia berargumen bahwa misogyny justru sering memandang perempuan sebagai “terlalu manusia”, dalam arti perempuan dianggap memiliki kapasitas, pengaruh, atau potensi yang dapat mengancam posisi dominan laki-laki dalam sistem patriarki. Oleh karena itu, perempuan kemudian menjadi sasaran pengendalian atau penindasan sebagai upaya untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan yang menguntungkan laki-laki.

Dalam konteks sosial dan politik, Manne juga menyoroti bagaimana misogyny kerap muncul dalam bentuk pembelaan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya ketika pelaku merupakan laki-laki yang memiliki kekuasaan atau privilese sosial yang tinggi. Dalam situasi tersebut, sering kali muncul narasi yang membela pelaku sekaligus menyalahkan korban, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi norma patriarki yang menjustifikasi kekerasan tersebut.

Secara keseluruhan, teori misogyny yang dikemukakan oleh Kate Manne menunjukkan bahwa misogyny merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kekuasaan patriarki. Misogyny berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, pengendalian, serta penegakan norma

gender yang mempertahankan hierarki antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, misogyny tidak hanya dipahami sebagai sikap individual, melainkan juga sebagai fenomena yang bersifat sistemik dan struktural, yang beroperasi melalui norma sosial, institusi, serta praktik budaya dalam masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menjadi bahan untuk analisis yakni;

### ***Delegitimasi Moral Perempuan***

Delegitimasi moral perempuan merupakan bentuk misogyny yang dilakukan dengan melemahkan posisi perempuan di ruang publik melalui serangan terhadap moralitas dan kehidupan pribadinya. Dalam banyak kasus, perempuan tidak dinilai berdasarkan gagasan atau kemampuannya, melainkan melalui narasi yang mempertanyakan karakter dan integritasnya. Dalam pandangan Kate Manne, praktik ini menjadi bagian dari mekanisme sosial yang digunakan untuk menegakkan norma patriarki terhadap perempuan.

### ***Intimidasi atau Pelecehan Digital***

Intimidasi atau pelecehan digital adalah bentuk misogyny yang terjadi di ruang digital, seperti media sosial atau platform komunikasi daring. Bentuknya dapat berupa komentar merendahkan, pelecehan secara daring, maupun penyebaran konten yang menyinggung atau merendahkan perempuan. Menurut Kate Manne, praktik ini sering menjadi cara untuk menekan dan membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik digital.

### ***Policing Terhadap Perempuan di Ruang Publik***

Policing terhadap perempuan di ruang publik merujuk pada praktik pengawasan atau penilaian sosial terhadap perempuan ketika mereka terlibat dalam aktivitas publik, termasuk politik. Perempuan sering kali lebih diserang secara personal dibandingkan dikritik berdasarkan gagasan atau programnya. Dalam kerangka pemikiran Kate Manne, praktik ini merupakan bentuk kontrol sosial yang menjaga agar perempuan tetap berada dalam batasan peran gender yang dianggap sesuai oleh masyarakat.

### ***Objektivitas Tubuh Perempuan.***

Objektifikasi tubuh perempuan terjadi ketika tubuh perempuan dijadikan objek penilaian, komentar, atau ejekan di ruang publik. Fokus terhadap aspek fisik tersebut sering kali mengabaikan kemampuan atau kontribusi perempuan sebagai individu. Dalam perspektif Kate Manne, objektifikasi merupakan salah satu bentuk praktik misogyny yang mereduksi perempuan menjadi objek yang dapat dinilai atau dipermalukan di ruang publik.

Keempat indikator ini menunjukkan bagaimana misogini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang tidak hanya bekerja pada tingkat individu, tetapi juga melalui praktik-praktik diskursif dan interaksi di ruang publik maupun ruang digital. Dengan menggunakan indikator-

indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk misogini yang muncul dalam representasi dan respons terhadap perempuan yang terlibat dalam ranah publik, khususnya dalam konteks politik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam fenomena kekerasan politik berbasis gender dalam pemilihan umum daerah tahun 2020 dan pengaruhnya terhadap representasi perempuan di Kota Tangerang Selatan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dan faktor-faktor di balik kekerasan politik berbasis gender dalam proses politik lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur menggunakan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara kekerasan politik berbasis gender dan tingkat representasi perempuan dalam pemilihan umum daerah tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan politik berbasis gender tetap menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi perempuan dalam partisipasi politik mereka. Bentuk kekerasan ini tidak selalu terwujud secara fisik; kekerasan ini juga dapat berupa serangan simbolis, narasi yang merendahkan, atau pelecehan di ruang digital. Serangan semacam itu sering kali menargetkan perempuan, dengan tujuan mempermalukan atau mendiskreditkan mereka sebagai aktor politik. Dalam konteks politik elektoral, perempuan sering kali diserang atas dasar hal-hal pribadi seperti penampilan, kondisi fisik, atau kehidupan pribadi mereka sehingga mengalihkan perhatian publik dari kemampuan, gagasan, dan platform politik yang mereka tawarkan (Rani et al., 2025).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep misogini yang dikemukakan oleh Kate Manne. Manne memandang misogini bukan sekadar bentuk kebencian terhadap perempuan, melainkan sebagai mekanisme sosial dalam sistem patriarki yang berfungsi untuk memantau, mengontrol, dan menghukum perempuan yang dianggap menyimpang dari norma gender tradisional. Dalam konteks politik, mekanisme ini sering muncul ketika perempuan memasuki ruang publik yang secara historis didominasi oleh laki-laki. Kehadiran perempuan sebagai aktor politik kemudian berpotensi memicu berbagai serangan yang bertujuan untuk

merendahkan, mendisiplinkan, atau merongrong legitimasi mereka di ranah publik (Hanryana & Putri, 2025).

Selama Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2020, dinamika ini terlihat jelas dalam serangan yang dialami oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai salah satu calon wali kota. Sebuah postingan media sosial menampilkan foto Saraswati saat sedang hamil, disertai dengan komentar-komentar kasar seperti “bagi yang mau memilih perutnya, silakan saja.” Insiden ini menunjukkan bagaimana kekerasan politik berbasis gender dapat terjadi di ranah digital dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai sasaran serangan dalam kontestasi politik, permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui teori misogyny yang terdapat beberapa indikator didalamnya.

### **Delegitimasi Moral Perempuan**

Deligitimasi moral terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk misogini yang hadir di ruang politik, praktik misogini dilakukan untuk menyerang moralitas, tubuh, serta kehidupan pribadi perempuan dengan dasar tujuannya melemahkan legitimasi politik nya di ruang publik (Ramadhani, 2020). Perempuan ketika terjun ke dunia politik sering kali tidak dinilai berdasarkan gagasan dan kapasitas intelektual dalam memimpin, melainkan melalui narasi yang selalu mempertanyakan integritas pribadi dan moralitasnya. Berdasarkan perspektif Manne, misogini bekerja sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menegakkan norma patriarki dengan cara menghukum perempuan yang dianggap melampaui peran tradisionalnya di ruang publik.

Kemudian delegitimasi moral hadir dalam bentuk serangan simbolik yang memanfaatkan tubuh dan pengalaman biologis perempuan untuk dijadikan alat untuk merendahkan perempuan. Tubuh perempuan dijadikan objek penilaian moral, sehingga legitimasi politiknya bergeser dari kapasitas intelektual ke persoalan moralitas pribadi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perempuan dalam politik tidak hanya menghadapi persaingan ide dan program, tetapi juga menghadapi kontrol sosial yang kuat terhadap tubuh dan identitas gender sebagai perempuan. Persoalan moralitas perempuan terkadang dijadikan alat politik untuk menegaskan kembali batasan patriarki terhadap peran perempuan di ruang publik (Frasetya & Nasution, 2021).

Selaras dengan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 menunjukkan bagaimana delegitimasi moral bekerja dalam praktik politik. Dimulai pada sebuah foto lama dirinya ketika sedang hamil kembali diunggah oleh akun bernama Bang Djoel pada platform facebook dengan narasi yang merendahkan dan secara eksplisit mengobjektifikasi tubuh perempuan, seperti

ajakan bernada seksual yang kemudian dikaitkan dengan pilihan politik. Foto tersebut sebenarnya diambil sekitar lima tahun sebelumnya dan tidak memiliki kaitan dengan kontestasi politik yang sedang berlangsung, namun foto tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai alat serangan politik untuk mempertanyakan kelayakannya sebagai pemimpin (tempo.co, 2023).

Kecaman yang dialami oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ketika memasuki ranah politik yang dinilai bukan pada kompetensi kandidat melainkan pada tubuh dan kehidupan pribadinya (Ahmad et al., 2025). Tubuh perempuan kerap dijadikan objek penilaian public seolah-olah dapat dikontrol, dihakimi, dan dijadikan dasar untuk menilai kelayakan perempuan dalam ruang politik, padahal pada hakikatnya tubuh merupakan bagian dari otonomi pribadi yang tidak seharusnya menjadi alat legitimasi politik. Fenomena ini dapat dipahami melalui pemikiran Kate Manne mengenai misogini, yang tidak hanya dimaknai sebagai kebencian terhadap perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menegakkan norma patriarki. Dalam kerangka tersebut, perempuan yang tampil di ruang politik sering dipersepsikan melanggar batas peran gender tradisional, sehingga mereka menjadi sasaran serangan moral yang bertujuan melemahkan legitimasi politiknya dan mengembalikan mereka pada posisi subordinat dalam struktur sosial (Ahmad et al., 2025).

Delegitimasi moral yang muncul dalam kasus kekerasan berbasis gender dalam kontestasi pilkada yang dialami oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo juga menyoroti media sosial sebagai ruang yang mereproduksi praktik misogini dalam ranah politik. Melalui platform digital, suatu narasi yang merujuk pada merendahkan perempuan dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas sehingga serangan terhadap kandidat perempuan dapat terjadi secara masif. Situasi ini pada akhirnya memperkuat bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam politik, di mana reputasi serta kredibilitas perempuan dilemahkan melalui kampanye yang menitikberatkan pada penilaian moral dan seksualisasi tubuh.

### **Intimidasi atau Pelecehan Digital**

Dewasa ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai sarana komunikasi yang mampu menyebarkan informasi secara cepat, terlebih menjadi ruang untuk mengekspresikan pandangan terhadap persoalan sosial. Kehadiran media sosial melalui berbagai platform menghadirkan beragam manfaat, seperti mempermudah akses informasi, memperluas jaringan komunikasi, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas (Fatmawati, 2020). Namun di sisi lain, media sosial dipandang dapat menjadi pisau bermata dua hal tersebut dikarenakan selain memberikan dampak positif, berbagai platform juga berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi

yang merugikan, seperti ujaran kebencian, pelecehan, maupun serangan terhadap individu atau kelompok tertentu yang menghadirkan dampak negatif. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak hanya menghadirkan peluang bagi penguatan ruang publik digital, tetapi juga membawa risiko munculnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di ruang daring.

Terkait dengan intimidasi dan pelecehan digital merupakan salah satu bentuk misogini yang semakin sering terjadi dalam ruang publik digital, terutama praktiknya melalui media sosial. Praktik ini biasanya hadir dalam bentuk komentar merendahkan, pelecehan seksual secara daring, hingga penyebaran konten yang merendahkan perempuan (Adiyanto, 2020). Berpijak pada kerangka pemikiran Manne, misogini tidak hanya dipahami sebagai kebencian terhadap perempuan belaka tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menegakkan norma patriarki dengan cara menekan perempuan yang dianggap melampaui batas peran gender yang diharapkan. Dalam ruang digital mekanisme tersebut kemudian hadir melalui serangan daring secara personal atau terorganisir dengan dasar tujuan membatasi atau mengintimidasi perempuan agar menarik diri dari ruang publik.

Penyebaran foto Rahayu Saraswati Djojohadikusumo oleh akun Facebook yang tidak bertanggung jawab dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika kekerasan berbasis gender di ruang digital, di mana media sosial menjadi arena terjadinya intimidasi dan pelecehan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, ruang digital tidak bersifat netral, melainkan dapat berfungsi sebagai medium yang memungkinkan reproduksi komentar, narasi, dan tindakan yang menyerang identitas serta tubuh perempuan secara cepat dan meluas. Mengacu pada pemikiran Manne, praktik semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk misogini yang bekerja melalui mekanisme sosial untuk mendisiplinkan perempuan ketika mereka hadir di ruang publik, termasuk dengan cara mempermalukan, mengawasi, atau mengintimidasi mereka melalui distribusi konten visual dan respons publik yang menyertainya. Dengan demikian, kasus tersebut menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi tempat berlangsungnya pelecehan simbolik maupun psikologis yang beroperasi secara kolektif, sehingga memperlihatkan bagaimana teknologi komunikasi memperluas jangkauan praktik intimidasi terhadap perempuan (Fatmawati, 2020).

Situasi kekerasan yang terjadi tidak hanya berdampak pada salah satu sasaran individu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap partisipasi politik perempuan. Ketika ruang digital maupun arena politik tidak memberikan perlindungan yang memadai dari bentuk intimidasi dan pelecehan berbasis gender, perempuan cenderung merasa tidak memiliki ruang aman untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut dan tekanan sosial berpotensi memengaruhi keputusan perempuan untuk

maju sebagai kandidat atau mengambil peran kepemimpinan. Akibatnya, keterwakilan perempuan dalam institusi politik dapat terhambat, baik dari segi jumlah maupun kualitas partisipasinya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan dalam ruang politik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya representasi yang inklusif dan setara.

### **Policing Terhadap Perempuan di Ruang Publik**

Policing terhadap perempuan di ruang publik mengacu pada praktik pemantauan, pengendalian, dan penilaian sosial terhadap perempuan yang terlibat dalam kegiatan publik. Dalam banyak konteks sosial, perempuan yang tampil di ruang publik sering kali menghadapi berbagai bentuk kontrol sosial yang menilai perilaku, peran, dan identitas mereka berdasarkan norma gender yang berlaku. Praktik-praktik ini sering kali membatasi kebebasan perempuan untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai ranah kehidupan sosial dan politik (Luh et al., 2025).

Dalam studi mengenai respons terhadap kekerasan berbasis gender, praktik Policing sering dikaitkan dengan cara struktur sosial dan lembaga negara menanggapi kekerasan terhadap perempuan, serta bagaimana norma gender memengaruhi perlakuan terhadap perempuan di ruang publik. Penelitian mengenai respons terhadap kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa sistem sosial dan kelembagaan yang didominasi oleh budaya maskulin sering kali tidak peka terhadap pengalaman perempuan, sehingga memperkuat ketidaksetaraan gender yang sudah ada (Carrington et al., 2022).

Pada konteks partisipasi perempuan di ranah publik, praktik-praktik policing dapat diamati melalui berbagai bentuk kritik atau serangan yang tidak berfokus pada kemampuan atau gagasan perempuan, melainkan pada aspek-aspek pribadi yang melekat pada identitas gender mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang aktif di ranah publik sering kali menghadapi pengawasan sosial yang lebih ketat dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, pengendalian terhadap perempuan berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang membantu mempertahankan norma-norma patriarkal dan membatasi legitimasi perempuan di ranah publik (Fauzi, 2025).

Hal ini dapat dilihat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020, praktik policing terhadap perempuan di ruang publik terlihat jelas dalam serangan yang ditujukan kepada Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, salah satu calon wali kota (Tempo.co, 2020). Sebuah postingan di media sosial menampilkan foto Saraswati saat sedang hamil, disertai dengan komentar-komentar kasar. Alih-alih mengkritik visi politik, platform, atau kapasitas kepemimpinannya sebagai calon, serangan tersebut justru ditujukan pada aspek-aspek pribadi yang berkaitan dengan tubuh dan kehidupan pribadinya. Hal ini menunjukkan

bahwa partisipasi perempuan dalam kontestasi politik sering kali memicu bentuk-bentuk pengawasan sosial yang bertujuan untuk mendisiplinkan mereka atau merongrong legitimasi mereka di ruang publik.

Jika melihat dari prespektif teori misogini yang dikemukakan oleh Kate Manne, praktik-praktik semacam itu dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang dirancang untuk mengendalikan perempuan yang dianggap telah melampaui batas-batas peran gender tradisional. Ketika perempuan memasuki ranah politik, yang telah lama didominasi oleh laki-laki, berbagai bentuk serangan pribadi mungkin muncul sebagai cara untuk menegaskan kembali norma-norma patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih subordinat. Dengan demikian, serangan terhadap Saraswati dapat dipahami tidak hanya sebagai kritik individu di media sosial, tetapi juga sebagai bagian dari praktik-praktik misoginis yang berusaha membatasi legitimasi dan partisipasi perempuan di ranah politik.

### **Objektivitas Tubuh Perempuan**

Objektifikasi tubuh perempuan mengacu pada praktik memperlakukan tubuh perempuan sebagai objek penilaian, komentar, atau ejekan yang bersifat seksual atau merendahkan (Malikussaleh, 2024). Dalam banyak kasus, perhatian terhadap perempuan sering kali lebih terfokus pada penampilan fisik mereka daripada pada kemampuan, gagasan, atau peran sosial mereka. Praktik ini mencerminkan konstruksi sosial yang terus memposisikan tubuh perempuan sebagai objek visual yang dapat dinilai, dikomentari, atau bahkan dieksploitasi di ruang publik (Gorisha et al., 2025).

Berbagai penelitian mengenai tubuh dan gender menunjukkan bahwa tubuh perempuan sering kali digambarkan sebagai objek visual yang berada dalam dinamika kekuasaan tertentu. Penggambaran tubuh perempuan di ruang digital dan media sering kali menempatkan tubuh sebagai pusat perhatian melalui visualisasi yang menonjolkan aspek estetika atau sensualitas. Situasi ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan sering kali direduksi menjadi objek konsumsi visual yang harus sesuai dengan standar estetika dan norma patriarki yang lazim di masyarakat (Sains & Dinata, 2025).

Selain itu, objektifikasi tubuh perempuan juga terkait dengan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang muncul dalam kontestasi politik. Penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam politik sering kali mengalami kekerasan simbolis dan seksual, termasuk komentar yang berfokus pada tubuh atau penampilan fisik mereka. Serangan semacam itu bertujuan untuk merendahkan dan mendiskreditkan perempuan sebagai aktor politik, sehingga

mengalihkan perhatian publik dari kemampuan kepemimpinan mereka (Wildianti & Ramadhana, 2024).

Objektifikasi tubuh perempuan terlihat jelas dalam serangan yang ditujukan kepada Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di media sosial. Sebuah postingan yang beredar di internet menampilkan foto Saraswati saat ia sedang hamil, disertai dengan komentar-komentar kasar, seperti kalimat “*yang mau coblos udelnya silakan.*” Komentar-komentar ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan objek ejekan dalam kontestasi politik. Alih-alih membahas visi, program, atau kemampuan kepemimpinannya sebagai calon kepala daerah, perhatian publik justru terfokus pada tubuhnya sebagai seorang perempuan.

Hal ini, mencerminkan praktik objektifikasi tubuh perempuan di ranah politik publik. Tubuh perempuan digunakan sebagai sasaran komentar seksual atau ejekan yang merendahkan, sehingga mengalihkan perhatian dari perdebatan substantif mengenai gagasan dan program politik. Serangan semacam itu menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam politik masih sering dipandang sebagai objek fisik yang dapat dinilai atau dipermalukan di ranah publik, alih-alih sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas kepemimpinan.

Dari perspektif teori misogini Kate Manne, praktik ini dapat dipahami sebagai mekanisme sosial dalam sistem patriarki yang berfungsi untuk merendahkan dan mendisiplinkan perempuan yang tampil di ranah publik. Objektifikasi tubuh adalah salah satu cara untuk merongrong legitimasi perempuan sebagai aktor politik, sekaligus mempertahankan hierarki gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam ranah politik yang secara historis didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, objektifikasi tubuh perempuan bukan sekadar soal representasi visual, melainkan juga merupakan bagian dari mekanisme kekerasan simbolik yang dapat membatasi legitimasi perempuan di ranah publik. Ketika tubuh perempuan dijadikan bahan komentar atau olok-olok, perempuan tidak lagi dipandang sebagai subjek politik yang memiliki gagasan dan kemampuan, melainkan direduksi menjadi objek fisik yang dapat dinilai atau dipermalukan di ranah publik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada kesimpulan nya kekerasan berbasis gender yang dialami oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 memaparkan bahawasannya ketika perempuan memasuki ranah politik, tidak hanya bersaing secara gagasan dan performa kualitas kepemimpinan tetapi juga menghadapi serangan yang menasar identitas gender dan kehidupan pribadi yang seharusnya bukan menjadi konsumsi publik. Penelitian ini dikaji melalui teori misogini Kate Manne dengan empat

indikator utama yakni delegitimasi moral, intimidasi dan pelecehan digital, policing di ruang publik, dan objektifitas tubuh perempuan. Berdasarkan analisis dengan teori tersebut menunjukkan bahwasannya kekerasan tidak diartikan tindakan individu yang bersifat spontan, akan tetapi mekanisme sosial yang terstruktur dalam sistem patriarki dimana sistem bekerja untuk mengendalikan dan melemahkan legitimasi politik perempuan yang dianggap keluar dari norma, terlebih kekerasan berbasis gender dalam ruang digital mampu membuat sistem bekerja secara cepat dan masif.

Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa tindak kekerasan yang berlatar belakang gender di arena kontestasi politik membawa pengaruh nyata terhadap sejauh mana perempuan dapat terwakili dalam kehidupan politik. Apabila arena politik maupun ruang komunikasi digital belum mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi perempuan, maka akan tumbuh berbagai tekanan psikis dan sosial yang pada akhirnya membuat perempuan enggan untuk maju sebagai kandidat ataupun mengambil posisi kepemimpinan di ranah publik. Atas dasar itulah, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih terarah dan menyeluruh dari berbagai elemen mencakup pembaruan regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender di lingkungan digital, penumbuhan kesadaran masyarakat mengenai praktik misogini, serta perubahan mendasar dalam budaya berpolitik menuju tata kelola yang lebih terbuka dan berkesetaraan gender sehingga kehadiran perempuan dalam politik tidak lagi berhenti pada pemenuhan syarat kuota, tetapi benar-benar bermakna secara substansial.

## DAFTAR REFERENSI

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai ruang diskusi upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2). <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>
- Ahmad, N. M., Anam, S., & Aisyi, H. R. (2025). Kritik narasi misoginis: Analisis pemikiran Fatima Mernissi tentang hadis dan kuasa perempuan. *Iklila*, 8(1). <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i1.347>
- Ahmad, N. M., Anam, S., & Aisyi, H. R. (2025). Kritik narasi misoginis: Analisis pemikiran Fatima Mernissi tentang hadis dan kuasa perempuan. *Iklila*, 8(1). <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i1.347>
- Carrington, K., Sozzo, M., Ryan, V., & Rodgers, J. (2022). Women-led police stations: Reimagining the policing of gender violence in the twenty-first century. *Policing and Society*. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956925>
- Charity, M. S., Ayu, G., & Prima, A. (2025). Peran hukum dalam mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik dan privat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).

- Charity, M. S., Ayu, G., & Prima, A. (2025). Peran hukum dalam mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik dan privat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Fathoni, Y. N. (2024). Penurunan persentase keterwakilan perempuan pada partai politik dan konsekuensi dari KPU melalui perbandingan pemilu calon tetap DPR tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>
- Fathoni, Y. N. (2024). Penurunan persentase keterwakilan perempuan pada partai politik dan konsekuensi dari KPU melalui perbandingan pemilu calon tetap DPR tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>
- Fatmawati, E. (2020). Kebebasan informasi kalangan milenial dalam bermedia sosial. *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, 10(2), 94–103. <https://doi.org/10.20473/jpua.v10i2.2020.94-103>
- Fatmawati, E. (2020). Kebebasan informasi kalangan milenial dalam bermedia sosial. *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, 10(2), 94–103. <https://doi.org/10.20473/jpua.v10i2.2020.94-103>
- Fauzi, Z. (2025). Jeritan perempuan dalam pemaksaan ideologi patriarki yang menuai ketimpangan keadilan gender, 134–147.
- Frasetya, V., & Nasution, N. A. (2021). Kekerasan simbolik pada fasilitas ladies parking. *Al-Huwariyah*. <https://doi.org/10.24042/jwcs.v1i1.9963>
- Frasetya, V., & Nasution, N. A. (2021). Kekerasan simbolik pada fasilitas ladies parking. *Al-Huwariyah*. <https://doi.org/10.24042/jwcs.v1i1.9963>
- Gorisha, M. S., Hermawan, A., & Anisa, D. D. (2025). Reproduksi maskulinitas toksik di ruang digital: Analisis kualitatif komentar Instagram. *Cantrik*, 5, 157–174. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol5.iss2.art5>
- Hanryana, U. F., & Putri, L. G. S. (2025). Internalisasi misogini: Kekerasan seksual sebagai refleksi budaya patriarki. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 15(1). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v15i1.1423>
- Luh, N., Esa, M., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Politik tubuh perempuan antara kontrol sosial dan resistensi. *SHKR*, 2(3), 1–12. <https://doi.org/10.61292/shkr.247>
- Malikussaleh, U. (2024). Narasi tubuh perempuan: Kritik feminisme dalam *My Body* oleh Emily Ratajkowski. *Jurnal Penelitian*, 1(7), 754–761. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i7.142>
- Mikkola, M. (2018). *Down girl: The logic of misogyny*, by Kate Manne. *Australian Journal of Philosophy*. <https://doi.org/10.1080/00048402.2018.1475497>

- Ramadhani, D. (2020). Modal caleg perempuan dan politik patriarki dalam pemilihan umum di Indonesia: Keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>
- Ramadhani, D. (2020). Modal caleg perempuan dan politik patriarki dalam pemilihan umum di Indonesia: Keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>
- Rani, C., Destiana, N., & Angeliie, D. (2025). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam konteks misogini dan seksisme pada media sosial X (Twitter). *Linimasa*, 8(1). <https://doi.org/10.23969/linimasa.v8i1.20646>
- Sains, N. J., & Dinata, B. (2025). Tubuh, gender, dan agensi: Kajian antropologi visual tentang representasi perempuan di media sosial. *Jurnal Sains*, 1(1), 57–71.
- Tempo.co. (2020). Diserang lewat foto hamilnya, Rahayu Saraswati: Ini tak bisa ditolerir. <https://www.tempo.co/arsip/diserang-lewat-foto-hamilnya-rahayu-saraswati-ini-tak-bisa-ditolerir-570224>
- Tempo.co. (2023). Soal pelecehan seksual foto kehamilan, Rahayu Saraswati segera lapor ke polisi. <https://tempo.co/hukum/soal-pelecehan-seksual-foto-kehamilan-rahayu-saraswati-segera-lapor-ke-polisi-569893>
- Tempo.co. (2023). Soal pelecehan seksual foto kehamilan, Rahayu Saraswati segera lapor ke polisi. <https://tempo.co/hukum/soal-pelecehan-seksual-foto-kehamilan-rahayu-saraswati-segera-lapor-ke-polisi-569893>
- Walker, R. L., & Walker, L. (2024). Call it misogyny. <https://doi.org/10.1177/14647001221119995>
- Wildianti, D., & Ramadhana, P. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu: *Violence against women in elections and its impact on women's political representation*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), 95–108. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8695>
- Wildianti, D., & Ramadhana, P. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu: *Violence against women in elections and its impact on women's political representation*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), 95–108. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8695>
- Wildianti, D., & Ramadhana, P. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu: *Violence against women in elections and its impact on women's political representation*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), 95–108. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8695>